

2022



RENCANA KERJA

INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

JL, DEWI SARTIKA NO.47 KOTA PALU

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT bahwa Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 telah selesai disusun, yang merupakan amanat undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Renja OPD merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan rencana strategis (Renstra) OPD lima tahunan yang dituangkan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional, yang memuat kebijakan, program-program dan kegiatan indikatif sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Setiap program yang akan dilaksanakan pada Tahun 2022, telah disesuaikan dengan rencana pencapaian indikator target dan sasaran pertahunnya menurut Rencana Strategi (Renstra) Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 sehingga Renja yang disusun mempunyai hubungan yang sistematis dan logis dengan Renstra dan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026.

Tersusunnya Rencana Kerja (Renja) ini tidak terlepas dari partisipasi semua pihak yang ada di Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, besar harapan kami agar Renja ini dapat bermanfaat, khususnya bagi Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi penentu kebijakan.

Palu,September 2021

**INSPEKTUR DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



Drs M. MUCHLIS., MM
Pembina Utama Madya
NIP.19710222 199012 1 001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	3
BAB II HASIL EVALUASI RENJA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra.....	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	13
2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	16
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	19
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	25
BAB III TUJUAN DAN SASARAN	
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	26
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	26
3.3. Program dan Kegiatan	26
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH	
	33
BAB V PENUTUP	34

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan pada level organisasi perangkat daerah dan disusun sebagai penjabaran Rencana Strategis (Renstra) yang berisikan informasi tentang rencana program dan kegiatan yang akan dikerjakan OPD dalam satu tahun anggaran yang dilengkapi dengan kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta memberikan gambaran mengenai tujuan, sasaran dan target kinerja dan bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan OPD sesuai dengan tupoksinya.

Rencana Kerja Tahunan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 merupakan penjabaran kegiatan tahunan dari Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021–2026. Sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yaitu :

VISI	MISI
<i>Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju</i>	1. Meningkatkan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan Dasar
	2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Spritual Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai Kemanusiaan dan HAM
	3. Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan
	4. Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah
	5. Menjalankan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan
	6. Menjaga Harmonisasi Manusia dan alam, Antar Sesama Manusia sebagai Wujud Pembangunan Berkelanjutan
	7. Melakukan Sinergitas Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Bertetangga Sekawasan maupun di Dalam Provinsi Sulawesi Tengah dan di Luar Provinsi Bertetangga
	8. Meningkatkan Pelayanan Publik bidang Pendidikan dan Kesehatan berbasis pada Teknologi Informasi yang Integrasi dan dijalankan secara sistematis dan digital
	9. Mendorong Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) agar terjadi Percepatan Desentralisasi Pelayanan dan Peningkatan Lapangan Kerja dan Peningkatan Produktivitas Sektor Unggulan Daerah

Hal ini yang menjadi acuan dan dasar bagi program – program Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Program Penyelenggaraan Pengawasan, Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 adalah :

1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

- Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 2019.
 10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 7);

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk periode 1 (satu) tahun dengan maksud untuk memberikan arah, acuan dalam program dan kegiatan penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah serta menjadi tolok ukur penilaian kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2022.

Penyusunan Renja Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 bertujuan :

- a. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan.
- b. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2022, guna Tata Kelola Pemerintahan dan Pengawasan yang Akuntabel
- c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2021

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
- 2.3 Isu- Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA
INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Capaian Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Pelaksanaan evaluasi sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dalam Renja Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022. Adapun Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2021 berdasarkan realisasi sampai dengan triwulan II, yakni :

➤ Evaluasi pelaksanaan renja tahun 2021 :

Dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 18.789.198.129,- realisasi anggaran sampai dengan tw II adalah Rp. 8.174.812.437,- atau 43,51%. Dengan uraian Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

Target Anggaran Rp. 16.282.597.154,- realisasi Rp. 7.192.605.562,- atau 44,17 %. Dengan rincian :

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah target anggaran Rp. 253.062.500,- realisasi Rp. 46.330.000,- dengan capaian kinerja 5 Dokumen (Renja, RKA, DPA, Lakip Tahun 2020);
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah target anggaran Rp. 12.278.606.565,- realisasi Rp. 6.196.148.673,- capaian kinerja 6 Bulan untuk pembayaran gaji dan tunjangan, serta 1 dokumen Lap. Prognosis;
- 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah target anggaran Rp. 52.547.500,- realisasi Rp. 1.650.000,- (3,14%), capaian kinerjanya 1 Laporan BMD;
- 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah target anggaran Rp. 350.372.750,- realisasi Rp. 32.991.000,- (9,42%), dengan capaian kinerjanya 5,54% untuk koordinasi dan pelaksanaan system informasi kepegawaian, dan 50 orang peserta dalam kegiatan Diklat berdasarkan Tupoksi;
- 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah target anggaran Rp. 385.405.751,- realisasi Rp. 168.985.526,- dengan persentase capaian kinerja 43,85%;
- 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah target anggaran Rp. 1.324.715.450,- realisasi Rp. 223.630.000,- dengan persentase capaian kinerja 16,88%;

- 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah target anggaran Rp. 1.159.415.275,- realisasi Rp. 416.300.863,- dengan persentase capaian kinerja 35,91%;
- 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah target anggaran Rp. 478.471.363,- realisasi Rp. 106.569.500,- dengan persentase capaian kinerja 22,27%;

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Dengan anggaran sebesar Rp. 2.276.975.475,- realisasi anggaran sampai dengan tw II Rp. 957.089.875,- atau 42,03%. Dengan rincian :

- 1) Penyelenggaraan Pengawasan Internal target anggaran Rp. 1.237.317.225,- realisasi Rp. 164.351.625,- dengan persentase capaian kinerja 13,28%;
- 2) Penyelenggaraan Pengawasan dengan tujuan tertentu target anggaran Rp. 1.039.658.250,- realisasi Rp. 792.738.250,- dengan persentase capaian kinerja 76,25%;

3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Dengan anggaran sebesar Rp. 229.625.500,- realisasi anggaran sampai dengan tw II Rp. 25.117.000,- atau 10,94%. Dengan rincian :

- 1) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan target anggaran Rp. 18.175.000,- realisasi Rp. 460.000,- dengan persentase capaian kinerja 2,53%;
- 2) Pendampingan dan Asistensi target anggaran Rp. 211.450.500,- realisasi Rp. 24.657.000,- dengan capaian kineja 11,66%.

Berikut ini Tabel T-C. 29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2021 pada Inspektorat daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Data terlampir).

TABEL T-C. 29										
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN										
PENCAPAIAN RENSTRA S/D TRIWULAN II TAHUN 2021 (TAHUN BERJALAN) PROVINSI SULAWESI TENGAH										
Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1) 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.02	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG PENGAWASAN									
4.02.01	INSPEKTORAT DAERAH									
4.02.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat Layanan Administrasi Perkantoran	100 %	97,38 %	100 %	99,06 %	99,06 %	-	-	-
4.02.01.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar	Terlaksananya Koordinasi, Konsultasi, Rumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Program Kegiatan	100 %	99,09 %	100 %	100 %	100 %	-	-	-
4.02.01.01.19	Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	Terlaksananya Jasa Pelayanan Perkantoran	100 %	95,68 %	100 %	98,89 %	98,89 %	-	-	-
4.02.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tingkat Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	99,70 %	100 %	98,80 %	98,80 %	-	-	-
4.02.01.02.12	Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	99,83 %	100 %	96,57 %	96,57 %	-	-	-
4.02.01.02.30	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	99,23 %	100 %	99,11 %	99,11 %	-	-	-
4.02.01.20	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggara Pemda	LHP/%/ Dok	LHP/%/ Dok	LHP/%/ Dok	LHP/%/ Dok	LHP/%/ Dok	-	-	-
4.02.01.20.01	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan, terwujudnya Efisien, efektif, dan akuntabilitas Penyelenggaraan Pemda	40 OPD	30 OPD	35 OPD	35 OPD	100 %	-	-	-
4.02.01.20.06	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, Itjen Kemendagri, Inspektorat Provinsi	80 %	74 %	76 %	76 %	100 %	-	-	-
4.02.01.20.07	Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif	Terwujudnya peta pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Prov. Sulteng	2 Dok	2 Dok	-	-	100 %	-	-	-

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub. Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1) 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.02.01.20.10	Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat	Terlaksananya penyelesaian laporan pengaduan masyarakat	2 LHP	10	LHP	10 LHP	100 %	-	-	-
4.02.01.20.11	Dukungan Kelancaran Evaluasi EKPPD	Terlaksananya Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kab/Kota	13 LHE	13 LHE	13 LHE	13 LHE	100 %	-	-	-
4.02.01.21	PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengawasan	104 Org	94 Org	104 Org	104 Org	100 %	-	-	-
4.02.01.21.01	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Terpenuhinya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	104 Org	94 Org	104 Org	104 Org	100 %	-	-	-
4.02.01.24	PROGRAM MENGINTENSIFKAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT	Inventarisasi Pengaduan Masyarakat dan Laporan Inpres	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100 %	-	-	-
4.02.01.24.01	Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat	Terlaksananya Inventarisasi Pengaduan Masyarakat dan Laporan Inpres No. 5 Tahun 2004	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100 %	-	-	-
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN									
6.01	INSPEKTORAT DAERAH									
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Terlaksananya Administrasi Perkantoran Yang Baik	100 %	-	-	-	-	100 %	44,17 %	44,17 %
6.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, RKA/RKAP, Ikhtisar Hasil Pengawasan, Lakip, Evaluasi Kinerja dan TEPRA	8 Dok.	-	-	-	-	8 Dok	5 Dok	62,50 %
6.01.01.1.01.01	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dok.	-	-	-	-	4 Dok	3 Dok	75 %
6.01.01.1.01.06	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Ikhtisar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Evaluasi Kinerja dan Teptra	4 Dok.	-	-	-	-	4 Dok	2 Dok	50 %
6.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Akuntansi Keuangan	1 Tahun		-	-	-	- Tahun	6 Bln	50 %
6.01.01.1.02.01	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	-	-	-	-	1 Tahun	6 Bln	50 %

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub. Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1) 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6.01.01.1.02.05	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun dan Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dok.	-	-	-	-	2 Dok.	1 Dok	50 %
6.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD	100 %	-	-	-	-	100 %	3,14 %	3,14 %
6.01.01.1.03.05	- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersusunnya Laporan BMD OPD	2 Lap.	-	-	-	-	2 Lap.	-	- %
6.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Sumber Daya Aparatur yang memiliki Kompetensi sesuai Bidanganya	100 %	-	-	-	-	100 %	9,42 %	9,42 %
6.01.01.1.05.04	- Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Meningkatnya Sumber Daya Manusia Aparatur	100 %	-	-	-	-	100 %	5,45 %	5,45 %
6.01.01.1.05.09	- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Sosialisasi Pengembangan SDM, Bimtek dan Diklat Pembentukan Fungsional PPUPD	162 Org	-	-	-	-	162 Org	50 Org	30,86 %
6.01.01.1.05.11	- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terwujudnya Profesionalitas Aparatur Pengawas	80 Org	-	-	-	-	80 Org	-	- %
6.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana	100 %	-	-	-	-	100 %	43,85 %	43,85 %
6.01.01.1.06.02	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana	100 %	-	-	-	-	100 %	100 %	100 %
6.01.01.1.06.05	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang tepat waktu	100 %	-	-	-	-	100 %	23,50 %	23,50 %
6.01.01.1.06.07	- Penyediaan Bahan/Material	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur	100 %	-	-	-	-	100 %	50 %	50 %
6.01.01.1.06.09	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rumusan kebijakan dan pelaksanaan program kegiatan	100 %	-	-	-	-	100 %	32,65 %	32,65 %
6.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana	100 %	-	-	-	-	100 %	16,88 %	16,88 %
6.01.01.1.07.06	- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Memadainya Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur	100 %	-	-	-	-	100 %	16,88 %	16,88 %

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub. Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun -1) 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Tepat waktu	100 %	-	-	-	-	100 %	35,91 %	35,91 %
6.01.01.1.08.02	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Memadainya Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur	100 %	-	-	-	-	100 %	33,27 %	33,27 %
6.01.01.1.08.04	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Memadainya Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur	100 %	-	-	-	-	100 %	37,03 %	37,03 %
6.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Memadainya Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur	100 %	-	-	-	-	100 %	22,27 %	22,27 %
6.01.01.1.09.01	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Memadainya Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur	100 -	-	-	-	-	100 %	16,58 %	16,58 %
6.01.01.1.09.06	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Memadainya Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur	100 -	-	-	-	-	100 %	9,61 %	9,61 %
6.01.01.1.09.09	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Memadainya Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur	100 -	-	-	-	-	100 %	26,77 %	26,77 %
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Pengawasan Pemerintahan Daerah	100 %	-	-	-	-	100 %	42,03 %	42,03 %
6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase OPD yang pengelolaan keuangan dan asset sesuai ketentuan yang berlaku dan bebas dari penyimpangan material	100 %	-	-	-	-	100 %	13,28 %	13,28 %
6.01.02.1.01.01	- Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan yang efisien dan efektif serta akuntabilitas penyelenggaraan PEMDA	100 %	-	-	-	-	100 %	-	- %
6.01.02.1.01.02	- Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan yang efisien dan efektif serta akuntabilitas penyelenggaraan PEMDA	100 %	-	-	-	-	100 %	-	- %

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1) 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6.01.02.1.01.03	- Reviu Laporan Kinerja	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan yang efisien dan efektif serta akuntabilitas penyelenggaraan PEMDA yang berkelanjutan	100 %	-	-	-	-	100 %	3,58 %	3,58 %
6.01.02.1.01.04	- Reviu Laporan Keuangan	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan yang efisien dan efektif serta akuntabilitas penyelenggaraan PEMDA yang berkelanjutan	100 %	-	-	-	-	100 %	40,54 %	40,54 %
6.01.02.1.01.06	- Kerjasama Pengawasan Internal	Terlaksananya kegiatan sinkronisasi pengawasan yang efisien, efektif dan akuntabilitas penyelenggaraan PEMDA	100 %	-	-	-	-	100 %	-	- %
6.01.02.1.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Terlaksananya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan APIP	100 %	-	-	-	-	100 %	30,21 %	30,21 %
6.01.02.1.02	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase OPD yang pengelolaan keuangan dan asset sesuai ketentuan yang berlaku dan bebas dari penyimpangan material	100 %	-	-	-	-	100 %	76,25 %	76,25 %
6.01.02.1.02.01	- Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Terlaksananya proses penanganan penyelesaian kerugian Negara/Daerah	100 %	-	-	-	-	100 %	-	- %
6.01.02.1.02.02	- Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan dan terwujudnya efisien dan efektif dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemda serta terlaksananya penyelesaian laporan pengaduan masyarakat	100 %	-	-	-	-	100 %	78,91 %	78,91 %

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub. Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1) 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase capaian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	100 %	-	-	-	-	100 %	10,94 %	10,94 %
6.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	100 %	-	-	-	-	100 %	2,53 %	2,53 %
6.01.03.1.01.01	- Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	1 Lap.	-	-	-	-	100 %	2,53 %	2,53 %
6.01.03.1.02	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Laporan Pendampingan dan Asistensi	100 %	-	-	-	-	100 %	11,66 %	11,66 %
6.01.03.1.02.02	- Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Pendampingan, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	100 %	-	-	-	-	100 %	14,32 %	14,32 %
6.01.03.1.02.03	- Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Monev serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan Korupsi	100 %	-	-	-	-	100 %	7,83 %	7,83 %
6.01.03.1.02.04	- Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	100 %	-	-	-	-	100 %	14,61 %	14,61 %

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai unsur Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Gubernur Sulawesi Tengah Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 16 Tahun 2019 tentang uraian tugas, fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan bahwa Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan di daerah provinsi dan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota. Dalam melaksanakan tugasnya Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan Pengawasan Internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Gubernur;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan administrasi inspektorat daerah;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas fungsinya.

Berikut ini Tabel T-C. 30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021.

TABEL T-C. 30
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NO.	INDIKATOR	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2020 (n-2)	TAHUN 2021 (n-1)	TAHUN 2022 (n)	TAHUN 2023 (n+1)	TAHUN 2020 (n-2)	TAHUN 2021 (n-1)	TAHUN 2022 (n)	TAHUN 2023 (n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan.				41.03 %	76.92 %	82.05 %					
2.	Evaluasi Nilai Reformasi Birokrasi OPD :											
	Nilai C				0	0	0					
	Nilai CC				49	0	0					
	Nilai B				0	49	49					
	Nilai BB				0	0	0					
	Nilai A				0	0	0					
	Nilai AA				0	0	0					
3.	Evaluasi Nilai SAKIP OPD :											
	Nilai C				0	0	0					
	Nilai CC				2	0	0					
	Nilai B				20	17	0					
	Nilai BB				26	27	38					
	Nilai A				1	5	11					
	Nilai AA				0	1	0					
4.	Nilai SAKIP Pemprov Sulteng			Nilai B	Nilai B	Nilai BB	Nilai A					
5.	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK-RI, Itjen Kemendagri, Inspektorat Provinsi											
	▪ Temuan BPK			73 %	75 %	77 %	79 %					
	▪ Itjen Kemendagri			84 %	86 %	88 %	90 %					
	▪ Inspektorat			74 %	77 %	80 %	85 %					

NO.	INDIKATOR	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2020 (n-2)	TAHUN 2021 (n-1)	TAHUN 2022 (n)	TAHUN 2023 (n+1)	TAHUN 2020 (n-2)	TAHUN 2021 (n-1)	TAHUN 2022 (n)	TAHUN 2023 (n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.	Monitoring Centre For Prevention (MCP) Program Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi			70 %	75 %	80 %	85 %					
7.	Pembangunan Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/ WBBM)			- OPD	4 OPD	8 OPD	12 OPD					
8.	Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN)			98 %	98 %	98 %	98 %					
9.	Tingkat Maturitas SPIP			Tkt. 3.10	Tkt. 3.20	Tkt. 3.40	Tkt. 3.60					
10.	Kapabilitas APIP			Level 2	Level 3	Level 3	Level 3					

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Adapun tingkat kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat dari realisasi indikator kinerja yang telah dicapai. Adapun koordinasi dan sinergi program antara Inspektorat Provinsi dengan Daerah Kabupaten/Kota serta Kementerian dan Lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan dapat dilakukan guna mengoptimalisasikan kinerja dalam mewujudkan Pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien melalui penyelenggaraan Pemerintahan yang profesional, efektif, efisien transparan dan akuntabel. Yang dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri terkait dengan tupoksi pengawasan dapat dijelaskan bahwa Pengawasan Internal Kemeterian Dalam Negeri dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan sasaran programnya :

- a. Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and government) dilingkungan Kementerian Dalam Negeri;
- b. Pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah yang baik dan pemerintahan yang berintegritas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Dalam pelaksanaan penentuan prioritas dan sasaran pembangunan untuk mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, terdapat beberapa permasalahan yaitu :

TABEL 2.3
PEMETAAN PERMASALAHAN UNTUK PENENTUAN PRIORITAS
DAN SASARAN PEMBANGUNAN
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Masih Rendahnya Nilai SAKIP Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah	Nilai SAKIP yang Rendah	Kurang Pahamnya OPD terhadap Tugas Pokok dan Fungsinya
			Kurang Tertibnya Administrasi
			Belum Optimalnya Evaluasi Dokumen Perencanaan
			Belum Optimalnya Pengukuran Kinerja
			Belum Optimalnya Evaluasi Kinerja
2	Masih Belum Optimalnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan	Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan yang belum optimal	Belum Optimalnya Pelaporan Kinerja
			Kurangnya Komitmen Pimpinan OPD dalam Penyelesaian Tindak Lanjut terhadap Hasil Pemeriksaan Tahun sebelumnya
			Kurangnya Koordinasi dan Komunikasi OPD
			Belum Optimalnya Kinerja Tim Penyelesaian Kerugian Daerah dan Majelis TPTGR
3	Masih Rendahnya Tingkat Maturitas SPIP	Tingkat Maturitas SPIP Masih Level 3	Belum Optimalnya Laporan Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah
			Belum Optimalnya Pelaksanaan Telaah Sejawat
			Belum Optimalnya Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Secara Mandiri
			Belum Optimalnya Penyusunan daftar resiko dan rencana tindak pengendalian secara berkesinambungan pada seluruh OPD

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
4	Masih Rendahnya Kapabilitas APIP	Kapabilitas APIP Masih Level 2	Belum Optimalnya Penerapan Managemen Resiko
			Belum Optimalnya Peran inspektorat sebagai Penjamin Mutu (Quality Assurance)
			Belum Optimalnya Peran inspektorat sebagai media konsultasi (Consulting)
			Belum Optimalnya Peningkatan SDM
			Kurangnya Alokasi Anggaran Pengawasan
5	Rendahnya Pencapaian Nilai Monitoring Centre For Prevention (MCP) Program Koordinasi dan Supervisi KPK	Nilai MCP yang Masih Rendah	Belum Optimalnya Dokumen Pendukung dalam pemenuhan Indikator MCP
			Belum Optimalnya Koordinasi dan Komunikasi dengan OPD terkait
6	Belum adanya OPD yang memenuhi Persyaratan untuk dicanangkan sebagai Unit Kerja Menuju Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM)	OPD belum memenuhi syarat untuk dicanangkan sebagai Unit Kerja Menuju Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM)	Belum Optimalnya Pembinaan Terhadap OPD yang akan diusulkan sebagai Unit Kerja Menuju Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM)
			Belum Optimalnya Koordinasi dan Komunikasi dengan OPD terkait
7	Belum Optimalnya Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN)	Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) belum optimal	Masih terdapat Wajib Lapor yang tidak tepat waktu dalam Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN)
			Pembaharuan Master Jabatan Belum Tepat Waktu
			Belum Optimalnya Koordinasi dan Komunikasi dengan Admin Unit

Dalam hal penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kepala Daerah mengharuskan setiap SKPD/OPD bersama - sama melakukan optimalisasi yang berbasis kinerja dengan anggaran yang tersedia untuk mendukung terwujudnya pencapaian visi dan misi Kepala Daerah. Seperti halnya Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan tugas pengawasan dan pengendalian intern dengan mengedepankan pembinaan dalam setiap kegiatan pengawasan.

Adapun tantangan dan peluang meningkatkan pelayanan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam melaksanakan tugasnya di bidang pengawasan dan pengendalian internal terhadap kebijakan Kepala Daerah adalah sebagai berikut :

1. Tantangan.
 - a. Tuntutan pelayanan masyarakat terhadap pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel dan bersih dari KKN.
 - b. Masih rendahnya tingkat kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan oleh SKPD, karena petugas yang menangani tidak berupaya untuk memahami dan mengimplementasikan regulasi yang berlaku.

- c. Implementasi pengendalian intern pada SKPD masih belum berjalan dengan baik.
 - d. Rendahnya penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan oleh OPD.
 - e. Belum efektifnya peran APIP sebagai penjamin mutu (*quality assurance*).
2. Peluang.
- a. Adanya komitmen pemimpin / Kepala Daerah yang tercermin dalam RPJMD.
 - b. Adanya kerjasama dalam bentuk Asistensi, Audit, dan Evaluasi dengan BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian intern pemerintah.
 - c. Tersedianya jaringan SIMDA dalam mendukung pelaporan, penyerapan / realisasi terkait dengan pengelolaan keuangan.
 - d. Dukungan dari pihak eksternal (Kemenpan, Kemendagri, BPK-RI, dan BPKP dan KPK) agar APIP mampu memberikan peringatan dini (*early warning sistem*) dalam pelaksanaan tugas pengawasan.

Sejalan dengan otonomi daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga mengamanatkan pentingnya sistem pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mencapai tujuan otonomi secara luas, nyata dan bertanggung jawab.

Isu strategis pembinaan dan pengawasan merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau yang belum dapat diselesaikan pada tahun - tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi kesinambungan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Isu strategis ditetapkan melalui pengkajian atas permasalahan pembinaan dan pengawasan yang terjadi, maka Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah merumuskan identifikasi permasalahan yang bersifat tepat dan strategis.

Isu - Isu dalam penyelenggaraan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang merupakan Peraturan Pemerintah terbaru dan sangat terkait dengan pengawasan, menuntut Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk melakukan pembinaan guna perubahan yang mendasar.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yaitu laporan keuangan yang disusun telah menerapkan prinsip-prinsip akuntansi yang bersifat transparan dan akuntabel serta berbasis akrual.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dapat menjamin pelaksanaan otonomi daerah berjalan dengan baik, tidak tumpang tindih sesuai kewenangan yang dimiliki, baik pada urusan wajib maupun urusan pilihan.
5. Meningkatkan kapasitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di bidang pengawasan, keuangan, kepegawaian dan peraturan perundang-undangan terkait pengawasan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan Rancangan awal RKPD serta memperhatikan sasaran dan prioritas program dan kegiatan, indikator dan target kinerja, serta pagu indikatif Perangkat Daerah, maka analisis kebutuhan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada Tabel T-C. 31 Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2022.

TABEL T-C. 31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2022
PROVINSI SULAWESI TENGAH

OPD : INSPEKTORAT DAERAH

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	Program/ Kegiatan / Sub.Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					18.509.074.855					37.018.149.710	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Inspektorat Provinsi	Persentase Capaian Penunjang Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	100 %	16.567.262.855	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Inspektorat Provinsi	Persentase Capaian Penunjang Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	100 %	33.134.525.710	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	8 Dok.	309.812.500	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	8 Dok.	619.625.000	
	Penyusunan Dokumen - Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dok.	294.347.500	Penyusunan Dokumen - Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dok.	588.695.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja	4 Dok.	15.465.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja	4 Dok.	30.930.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	14 Dok.	13.810.050.204	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	14 Dok.	27.620.100.408	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Laporan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	12 Lap.	13.794.585.204	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Laporan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	12 Lap.	27.589.170.408	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Dokumen Keuangan SKPD	2 Dok.	15.465.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Dokumen Keuangan SKPD	2 Dok.	39.930.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	2 Lap.	52.547.500	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	2 Lap.	105.095.000	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah	2 Lap.	52.547.500	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah	2 Lap.	105.095.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	Program/ Kegiatan / Sub.Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub.Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	4 Lap.	420.265.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	4 Lap.	840.530.000	
	- Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Laporan data Pegawai	1 Lap.	70.625.000	- Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Laporan data Pegawai	1 Lap.	140.530.000	
	- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Laporan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2 Lap.	200.000.000	- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Laporan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2 Lap.	400.000.000	
	- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Laporan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Lap.	150.000.000	- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Laporan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Lap.	300.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	4 Lap.	398.092.700	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	4 Lap.	796.185.400	
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Pengadaan	1 Pkt	8,303,000	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Pengadaan	1 Pkt	16.606.000	
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Pengadaan	1 Pkt	14,789,700	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Pengadaan	1 Pkt	29.579.400	
	- Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Pengadaan	1 Pkt	225,000,000	- Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Pengadaan	1 Pkt	450.000.000	
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan	1 Lap.	150,000,000	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan	1 Lap.	300.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Lap.	150.415.450	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Lap.	300.830.900	
	- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Pkt	150.415.450	- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Pkt	300.830.900	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	Program/ Kegiatan / Sub.Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub.Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Lap.	1.171.025.501	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Lap.	2.342.051.002	
	Penyediaan Jasa - Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bln	345.924.700	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bln	691.849.400	
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah paket Pelayanan Umum Kantor	1 Pkt	825.100.801	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah paket Pelayanan Umum Kantor	1 Pkt	1.650.201.602	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Lap.	255.054.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Lap.	510.108.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Jasa	1 Pkt	137.300.000	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Jasa	1 Pkt	274.600.000	
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	1 Pkt	43.890.000	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	1 Pkt	87.780.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung yang dipelihara	3 Pkt	73.864.000	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung yang dipelihara	3 Pkt	147.728.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPД					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	Program/ Kegiatan / Sub.Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub.Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Inspektorat Provinsi	Persentase Capaian Penyelenggaraan Pengawasan	20 %	1.511.812.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Inspektorat Provinsi	Persentase Capaian Penyelenggaraan Pengawasan	20 %	3.023.624.000	
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	452 Lap.	1.177.524.750	Penyelenggaraan Pengawasan Internal		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	452 Lap.	2.355.049.500	
	- Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	48 Lap.	57.003.000	- Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	48 Lap.	114.006.000	
	- Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	48 Lap.	57.003.000	- Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	48 Lap.	114.006.000	
	- Reviu Laporan Kinerja		Jumlah Reviu Laporan Kinerja	162 Lap.	700.360.250	- Reviu Laporan Kinerja		Jumlah Reviu Laporan Kinerja	162 Lap.	1.400.720.500	
	- Reviu Laporan Keuangan		Jumlah Reviu Laporan Keuangan	49 Lap.	60.876.000	- Reviu Laporan Keuangan		Jumlah Reviu Laporan Keuangan	49 Lap.	121.752.000	
	- Kerjasama Pengawasan Internal		Jumlah Laporan Kerjasama Pengawasan Internal	1 Lap.	53.000.000	- Kerjasama Pengawasan Internal		Jumlah Laporan Kerjasama Pengawasan Internal	1 Lap.	106.000.000	
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi TLHP	144 Lap.	249.282.500	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi TLHP	144 Lap.	498.565.000	
	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	364 Lap.	334.287.250	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	364 Lap.	668.574.500	
	- Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah		Jumlah Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah	48 Lap.	33.750.000	- Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah		Jumlah Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah	48 Lap.	67.500.000	
	- Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		Jumlah Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	316 LHP	300.537.250	- Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		Jumlah Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	316 LHP	601.074.500	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	Program/ Kegiatan / Sub.Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan / Sub.Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Inspektorat Provinsi	Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dalam Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	20 %	430.000.000	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Inspektorat Provinsi	Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dalam Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	20 %	860.000.000	
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	1 Lap.	20.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	1 Lap.	40.000.000	
	- Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan		Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	1 Lap.	20.000.000	- Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan		Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	1 Lap.	40.000.000	
	Pendampingan dan Asistensi		Jumlah Laporan Pendampingan dan Asistensi	254 Lap.	410.000.000	Pendampingan dan Asistensi		Jumlah Laporan Pendampingan dan Asistensi	254 Lap.	820.000.000	
	Pendampingan, Asistensi, - Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		Jumlah Pendampingan, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	244 Lap.	130.000.000	Pendampingan, Asistensi, - Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		Jumlah Pendampingan, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	244 Lap.	260.000.000	
	- Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		Jumlah Monev serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan Korupsi	8 Lap.	150.000.000	- Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		Jumlah Monev serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan Korupsi	8 Lap.	300.000.000	
	Pendampingan, Asistensi dan - Verifikasi Penegakan Integritas		Jumlah Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	2 Lap.	130.000.000	- Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		Jumlah Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	2 Lap.	260.000.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat merupakan uraian hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik LSM, Asosiasi, Perguruan Tinggi, Perangkat Daerah yang langsung ditujukan kepada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Khusus untuk bidang pengawasan, usulan-usulan tersebut tidak dimunculkan/tidak ada dan disajikan dalam Tabel T-C. 32 sebagai berikut :

TABEL T-C. 32
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN
TAHUN 2022 PROVINSI SULAWESI TENGAH

OPD : INSPEKTORAT DAERAH

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 karena akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan 7 agenda Pembangunan Indonesia.

Visi Misi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025. RPJMN 2020-2024 dilaksanakan dengan Visi ***“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”***. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. Yang mana dari Sembilan Misi tersebut yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Profinsi Sulawesi Tengah pada Misi ke 8 (Delapan) yaitu ***“Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya”***.

3.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran RENJA tahun 2022 merupakan tujuan dan sasaran Renstra Inspektorat daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021-2026, yaitu : ***” Terwujudnya Reformasi Birokrasi Yang Inovatif dan Kolaboratif”***. Dari tujuan tersebut maka ditentukan sasaran sebagai berikut:

1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Efisien.
2. Terwujudnya Pengawasan dan Akuntabilitas Instansi Pemerintah.

3.3 Program dan Kegiatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah melakukan penyesuaian program dan kegiatan.

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan terhadap pencapaian kinerja tahun 2022 sesuai Permendagri tersebut terbagi dalam 3 program, 12 kegiatan dan 30 Sub Kegiatan. Program Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas inilah yang mendukung pencapaian kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 yang penyesuaian pemutakhirannya dilaksanakan melalui Sistem Informasi

Pemerintahan Daerah (SIPD). Program, kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut yakni :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD
- 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
- 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan/Material
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan

- 1) Penyelenggaraan Pengawasan Internal.
 - Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
 - Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
 - Reviu Laporan Kinerja
 - Reviu Laporan Keuangan
 - Kerjasama Pengawasan Internal
 - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

2) Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu.

- Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
- Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi

1) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan.

- Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan

2) Pendampingan dan Asistensi.

- Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
- Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
- Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

Berikut ini Tabel T-C. 33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

TABEL T-C. 33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023 PROVINSI SULAWESI TENGAH

OPD : INSPEKTORAT DAERAH

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM / KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN								
6	1				INSPEKTORAT DAERAH				18.509.074.855				37.018.149.710
6	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Capaian Penunjang Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	Inspektorat Provinsi	100 %	16.567.262.855	-		100 %	33.134.525.710
6	1	1	1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah		8 Dok.	309.812.500			8 Dok.	619.625.000
6	1	1	1	1	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		4 Dok.	294.347.500			4 Dok.	588.695.000
6	1	1	1	6	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja		4 Dok.	15.465.000			4 Dok.	30.930.000
6	1	1	1		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan		14 Dok.	13.810.050.204			14 Dok.	27.620.100.408
6	1	1	1	1	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Pembayaran Gaji dan Tunjangan		12 Lap.	13.794.585.204			12 Lap.	27.589.170.408
6	1	1	1	5	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Keuangan SKPD		2 Dok.	15.465.000			2 Dok.	30.930.000

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM / KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	1	1	1		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah		2 Lap.	52.547.500			2 Lap.	105.095.000
6	1	1	1	5	- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah		2 Lap.	52.547.500			2 Lap.	105.095.000
6	1	1	1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian		4 Lap.	420.265.000			4 Lap.	840.530.000
6	1	1	1	4	- Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan data Pegawai		1 Lap.	70.265.000			1 Lap.	140.530.000
6	1	1	1	9	- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Laporan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		2 Lap	200.000.000			2 Org	400.000.000
6	1	1	1	11	- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		1 Lap	150.000.000			1 Org	300.000.000
6	1	1	1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa		4 Lap.	398.092.700			4 Lap.	796.185.400
6	1	1	1	2	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Pengadaan		1 Paket	8.303.000			1 Paket	16.606.000
6	1	1	1	5	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Pengadaan		1 Paket	14.789.700			1 Paket	29.579.400
6	1	1	1	7	- Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Pengadaan		1 Paket	225.000.000			1 Paket	450.000.000
6	1	1	1	9	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan		1 Lap.	150.000.000			1 Lap.	300.000.000
6	1	1	1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1 Lap.	150.415.450			1 Lap.	300.830.900
6	1	1	1	6	- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya		1 Paket	150.415.450			1 Paket	300.830.900

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM / KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	1	1	1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2 Lap.	1.171.025.501			2 Lap.	2.342.051.002
6	1	1	1	2	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12 Bulan	345.924.700			12 Bulan	691.849.400
6	1	1	1	4	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah paket Pelayanan Umum Kantor		1 Paket	825.100.801			1 Paket	1.650.201.602
6	1	1	1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Lap.	255.054.000			3 Lap.	510.108.000
6	1	1	1	1	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa		1 Paket	137.300.000			1 Paket	274.600.000
6	1	1	1	6	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara		1 Paket	43.890.000			1 Paket	87.780.000
6	1	1	1	9	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang dipelihara		3 Paket	73.864.000			3 Paket	147.728.000
6	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Capaian Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat Provinsi	20 %	1.511.812.000	-		100 %	3.023.624.000
6	1	2	1		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal		452 Lap.	1.177.524.750			452 Lap.	2.355.049.500
6	1	2	1	1	- Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		48 Lap.	57.003.000			48 Lap.	114.006.000
6	1	2	1	2	- Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		48 Lap.	57.003.000			48 Lap.	114.006.000
6	1	2	1	3	- Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Reviu Laporan Kinerja		162 Lap.	700.360.250			162 Lap.	1.400.720.500

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM / KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	1	2	1	4	- Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Reviu Laporan Keuangan		49 Lap.	60.876.000			49 Lap.	121.752.000
6	1	2	1	6	- Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Kerjasama Pengawasan Internal		1 Lap.	53.000.000			1 Lap.	106.000.000
6	1	2	1	7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi TLHP		144 Lap.	249.282.500			144 Lap.	498.565.000
6	1	2	1		Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		364 Lap.	334.287.250			364 Lap.	668.574.500
6	1	2	1	1	- Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah		48 Lap.	33.750.000			48 Lap.	67.500.000
6	1	2	1	2	- Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		316 LHP	300.537.250			316 LHP	601.074.500
6	1	3			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dalam Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Inspektorat Provinsi	20 %	430.000.000	-		100 %	860.000.000
6	1	3	1		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		1 Lap.	20.000.000			1 Lap.	40.000.000
6	1	3	1	1	- Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan		1 Lap.	20.000.000			1 Lap.	40.000.000
6	1	3	1		Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Laporan Pendampingan dan Asistensi		254 Lap.	410.000.000			254 Lap.	820.000.000
6	1	3	1	2	- Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Pendampingan, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi		244 Lap.	130.000.000			244 Lap.	260.000.000
6	1	3	1	3	- Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Monev serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan Korupsi		8 Lap.	150.000.000			8 Lap.	300.000.000
6	1	3	1	4	- Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		2 Lap.	130.000.000			2 Lap.	260.000.000

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran berdasarkan arah kebijakan yang ditetapkan maka disusunlah program dan kegiatan. Program dan kegiatan yang tercantum dalam RENSTRA Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah merupakan program pendukung dalam pencapaian kinerja setiap bidang dan bagian yang dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahunan sesuai kebutuhan dan ketersediaan anggaran.

Dalam rangka melaksanakan Visi, Misi serta Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah menyusun rencana kerja tahun 2022 dan menguraikan dalam 3 (tiga) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 30 (tiga puluh) sub kegiatan dengan Total Anggaran Belanja sebesar Rp. 18.509.074.855,-.

Adapun rencana kerja dan pendanaan, indikator kinerja program (outcomes)/Kegiatan (output) Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 adalah sebagaimana tercantum pada Bab 3, pada Program dan Kegiatan Tabel T-C.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 disusun sebagai dokumen perencanaan selama 1 (satu) tahun meliputi program dan kegiatan yang didalamnya menggambarkan target capaian kinerja dan rencana kinerja anggaran..

Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah merunakan perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di pernerintah daerah yang mernberikan masukan utama dan mendasar untuk perencanaan yang lebih atas penyusunan Rencana Kerja.

Semoga Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemerintah dibidang pengawasan.

Selanjutnya bahwa Renja yang disusun ini jauh dari sempurna, maka diharapkan koreksi dan perbaikan materi dari berbagai pihak untuk penyempurnaan perencanaan dimasa-masa yang akan datang. Semoga Rencana Kerja tahun 2022 ini dapat bermanfaat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palu,September 2021

INSPEKTUR DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH



Drs. M. MUCHLIS., MM
Pembina Utama Madya
NIP.19710222 199012 1 001